



RENJA P -APBD TAHUN 2024

KECAMATAN BALEN



#BAHAGIA
MAKMUR
MEMBANGGAKAN

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas ridho dan rahmat-Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro merupakan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) di tahun 2024, .pada hakekatnya merupakan gambaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada lembaga/ satuan kerja selama tahun anggaran.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rankir Renja – PD) Tahun 2024 sebagai Bahan Musrenbang Kabupaten Tahun 2024. Harapan kami Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rankir Renja – PD) Tahun 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan RENJA – Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Balen.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro. Ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan strategi operasional dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Balen pada masa mendatang.

Kami menyadari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) P-Apbd tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi usaha kita dalam upaya mewujudkan Bojonegoro yang sejahtera, madani dan berdaya saing.

Balen , 31 Juli 2024

CAMAT BALEN



AGUS RAHARDJO, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690813 200112 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Balen	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balen	19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	34
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	35
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi	41
3.1.1. Penelaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.1.2. Penelaahan RPJMD Propinsi Jawa Timur	41
3.1.3. Penelaahan Kebijakan Penataan Ruang Kab. Bojonegoro.....	42
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD.....	42
3.3. Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V. PENUTUP	46

DAFTAR TABEL

Tabel TC. 29.....	12
Tabel TC. 30.....	22
Tabel TC. 31.....	33
Tabel TC. 32.....	37
Tabel TC. 33.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan sebagai upaya untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, maka Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Tahun 2025 . Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat(3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

a. Proses Penyusunan Renja

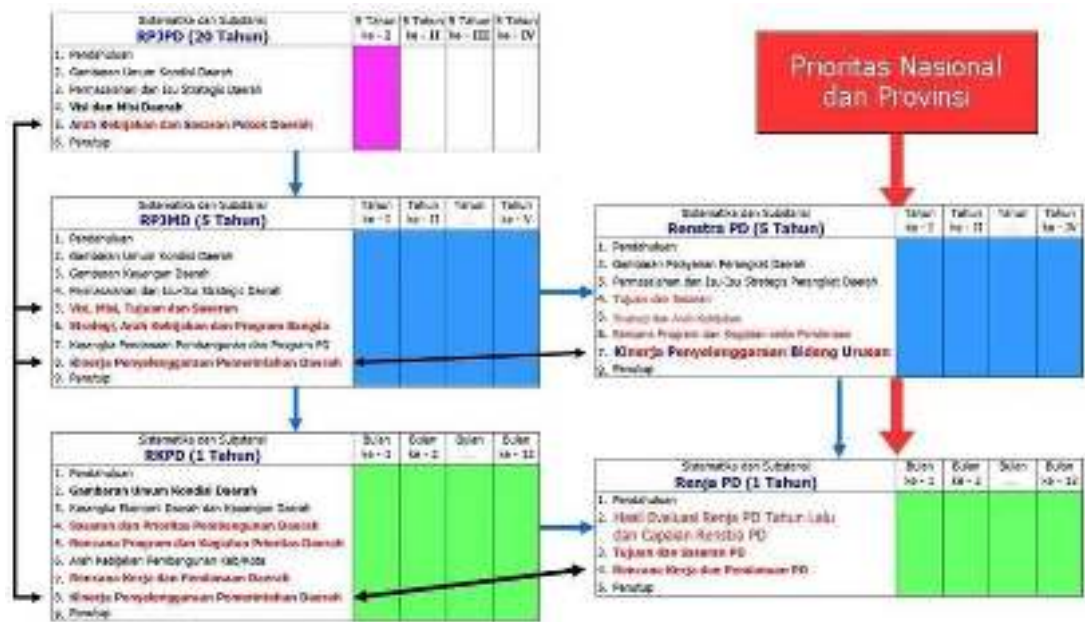
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja PD diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja PD dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan penyusunan Renja PD ;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan ;
- 3) Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD ;
- 4) Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah / lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran ;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
- 6) Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1(satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.

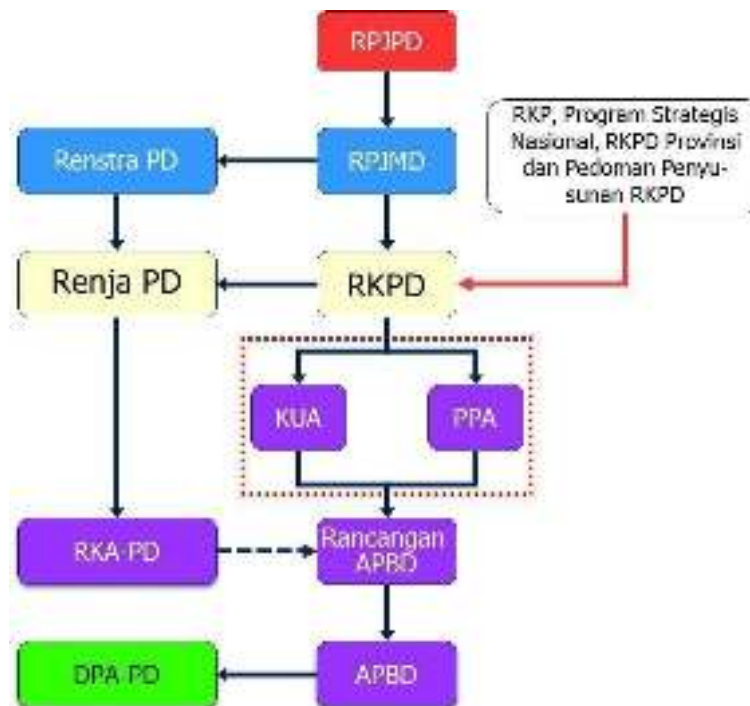
b. Keterkaitan Renja PD dengan RKPD, Renstra PD, Renja K/L Renja Provinsi/ Kabupaten/Kota, Proses Penyusunan RAPBD

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut :

Keterkaitan Dokumen Renja PD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah



Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD



Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balen tahun 2024 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kerja juga didasarkan pada

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2024. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKA-SKPD Tahun 2024, tahun-tahun selanjutnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Balen Tahun 2024 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang tahapan, tata Cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah.

11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Tahun 2014 - 2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan 8 susunan perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2016 Tentang Renja Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2023 tentang kedudukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Bojonegoro.
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 – 2026;
17. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Balen Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Balen dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balen dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024 adalah menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama

Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar.

Daftar Isi.

I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisa.

II. EVALUASI HASIL RENJA PD KECAMATAN BALEN TAHUN LALU.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Balen;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Balen;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Balen;
- 3.3. Program Dan Kegiatan.

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.

V. PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra PD.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balen merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Balen. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Balen ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Balen selama tahun 2023 dan Tahun 2024 berjalan serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Pagu anggaran Kecamatan Balen Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.492.942.383,00. Dari pagu P-APBD 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi penyerapan sebesar Rp. 3.338.101.667,00 atau 95,57 %. Untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk :

- 1) Evaluasi Capaian Kinerja Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 2) Realisasi program / kegiatanyang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaranyang direncanakan
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Balen, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2024	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan Pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
07	01	02	2.02		<i>Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</i>	Jumlah urusan pemerintahan tersebut yang dilaksanakan	3 Kali	1 kali	1	1	100			

07	01	02	2.02	01	Sub Kegiatan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan yang disusun	3 dok	1 dok	1	1	100			
07	01	02	2.03		Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	18 kali	8 kali	8	8	100			
07	01	02	2.03	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Pd dan/ Instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	18 kali	8 kali	8	8	100			
07	01	02	2.04		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	6 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	02	2.04	01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	3 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	02	2.04	03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	Jumlah rantang kasihmu yang disediakan	68540 rantang	20700 rantang	20700	20700	100			
07	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa / keluhan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100 %	100 %	100	100	100			

07	01	03	2.01		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	9 kali	3 kali	3	3	100			
07	01	03	2.01	01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	15 kel	5 kel	5	5	100			
07	01	03	2.01	02	Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	03	2.01	03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	3 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	100%	100	100	100			
07	01	04	2.01		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	4 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	04	2.01	02	sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	36 kali	2 Kali	2	2	100			

07	01	04	2.02		Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	6 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	04	2.02	01	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/Kepolisian Negara RI	Jumlah koordinasi yang dilakukan	6 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	04	2.03		Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	2 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	04	2.03	01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	2 kali	2 kali	2	2	100			
07	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100 %	100%	100	100	100			
07	01	06	2.01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas yang dilakukan	16 kali	8 kali	8	8	100			
07	01	06	2.01	01	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitas yang dilakukan	3 kali	1 kali	1	1	100			

07	01	06	2.01	05	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitas yang dilakukan	3 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah koordinasi yang dilakukan	3 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100	100	100			
07	01	01	2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang di Susun	13 dok	5 dok	5	5	100			
07	01	01	2.01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang di Susun	3 dok	1 dok	1	1	100			
07	01	01	2.01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	10 kali	4 kali	4	4	100			
07	01	01	2.01	03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	3 kali	3 kali	3	3	100			
07	01	01	2.01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	30 kali	10 kali	10	10	100			
07	01	01	2.01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Yang di Susun	6 dok	2 dok	2 dok	2	100			
07	01	01	2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang di Susun	6 lap	2 lap	2	2	100			

07	01	01	2.02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	63 orang	21 orang	20	20	98			
07	01	01	2.02	02	Sub Kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	3 lap	1 lap	1	1	100			
07	01	01	2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian yang disusun	0	0	0	0				
07	01	01	2.05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	0	0	0	0				
07	01	01	2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	6 lap	2 lap	2	2	100			
07	01	01	2.06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	22 unit	12 unit	12	12	100			
07	01	01	2.06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 buah	4 buah	4	4	100			
07	01	01	2.06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1230 buah	630 buah	630	630	100			
07	01	01	2.06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	0	0	0	0				

07	01	01	2.06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	189 kali	69 kali	69	69	100			
07	01	01	2.07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	1 kali	1 kali	0	0	0			
07	01	01	2.07	2	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas yang disediakan	1 unit	1 unit	0	0	0			
07	01	01	2.08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	7 jenis	3 jenis	3	3	100			
07	01	01	2.08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan Listrik yang disediakan	36 kali	12 kali	12	12	100			
07	01	01	2.08	03	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 kali	1 kali	1	1	100			
07	01	01	2.08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayan umum kantor yang disediakan	36 kali	12 kali	12	12	100			
07	01	01	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerinthan daerah	11 unit	3 unit	3	3	100			

07	01	01	2.09	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa yang disediakan	30 kali	10 kali	10	10	100			
----	----	----	------	----	--	-----------------------------	---------	---------	-----------	-----------	-----	--	--	--

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Balen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja:

- ❖ Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- ❖ Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
- ❖ Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Balen meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan;
- Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan;
- Adanya sarana dan prasarana.

b. Kelemahan

- Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
- Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan;

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan;
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
- Diklat peningkatan kualitas aparatur;

- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
 - Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram;
- b. Ancaman :
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;
 - Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
 - Kemajuan teknologi informasi yang arus media informasi yang merusak moral masyarakat;
 - Perubahan kebijakan pemerintah atasan yang cepat sehingga menyulitkan implementasi pembahasan program kegiatan;
 - Perubahan budaya masyarakat yang cenderung merusak tatanan kehidupan;

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Balen Tahun 2020, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Balen. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Balen dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Balen
Kabupaten Bojonegoro

No	Tujuan Baru	Sasaran Baru	Indikator Baru	Formulasi Baru	2022		2023		2024
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan		Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Dinilai Oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro	77	81,15	77,5	80,725	77,9
		meningkatkan kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum	Bobot sub aspek X 100 Nilai data kinerja	4,62	4,86	4,65	4,84	4,674
			Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu	Bobot sub aspek X 100 Nilai data kinerja	7,7	8,115	7,75	8,07	7,79
			Nilai kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif	Bobot sub aspek X 100 Nilai data kinerja	7,7	8,115	7,75	8,07	7,79
			Nilai kinerja penyelenggaraan tugas lainnya	Bobot sub aspek X 100 Nilai data kinerja	3,85	4,057	3,88	4,03	3,89
			Nilai Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	3,22	3,38	3,4
		Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraa n pemerintahan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif.	Bobot sub aspek X 100 Nilai data kinerja	27,72	29,21	27,9	29,06	28,04

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian awal Renstra (2018)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan			
					2019		2020	
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab								
Tujuan RPJMD : Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab		Indek Reformasi Birokrasi	Indek					
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kinerja pemerintahan		Indek Sinergitas Kinerja Kecamatan	Indek	70	75	784.402.620	76,9	1.218.780.70
	Tujuan PD : meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Nilai	70	75	784.402.620	76,9	1.218.780.70

					Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum	nilai	4,2	4,5	47.064.157	4,614	73.126.842
						Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu	nilai	7	7,5	78.440.262	7,69	121.878.070
						Nila kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif	nilai	7	7,5	78.440.262	7,69	121.878.070
						Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainya	nilai	3,5	3,75	39.220.131	3,845	60.939.035
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	persen					

7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	kali						
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan yang disusun	dokumen						
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	kali						

7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	unit						
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	kali						
						Jumlah lansia yang menerima program Rantang Kasihmu							
					Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif	Nilai	25,2	27	282.384.943	27,684	438.761.052	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	persen						
7	01	03	2,01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	kelompok						
7	01	03	2,01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						
7	01	03	2,03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	kali						
7	01	03	2,03	02	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbang kelurahan	kelompok						
7	01	03	2,03	02	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang	unit						

						dibangun							
7	01	03	2,03	03	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelompok						
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	persen						
7	01	04	2,01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						
7	01	04	2,02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						

7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						
7	01	04	2,03		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						
7	01	04	2,03	01	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	persen						
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						

7	01	06	2,01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						
7	01	06	2,01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						

					Wilayahnya							
					Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran		5,6	6	62.752.210	6,152	97.502.456
						Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan		18,9	20,25	211.788.707	20,763	329.070.789
4	01	07	01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	persen	100	91,21	670.128.620		
4	01	07	01.01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	jenis		12	45.600.000		
4	01	07	01.01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa yang disediakan	jenis		12	5.100.000		
4	01	07	01.01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan		2	59.045.000		

4	01	07	01.01	08	Penyediaan peralatan / bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jenis		2	33.616.000		
4	01	07	01.01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis		6	15.826.000		
4	01	07	01.01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	eksemplar		600	8.000.000		
4	01	07	01.01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit		2	20.000.000		
4	01	07	01.01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kali		12	45.601.620		
4	01	07	01.01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	bulan		12	1.800.000		
4	01	07	01.01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum kantor yang di sediakan	bulan		12	72.100.000		

4	01	07	01.01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi luar daerah yang dilakukan	kali		75	15.000.000		
4	01	07	01.01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/ Teknis perkantoran	jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	kali		12	6.540.000		
4	01	07	01.01	20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah yang dilakukan	kali		70	257.250.000		
4	01	07	01.01	22	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum.	jumlah penunjang pelaksanaan tugas yang disediakan	kali		4	84.650.000		
4	01	07	01.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana apatur	persen		98,43	96.274.000		
4	01	07	01.02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor yang disediakan	kali		1	15.000.000		
4	01	07	01.02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional yang	unit		5	32.624.000		

						disediakan						
4	01	07	01.02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin peralatanam gedung kantor yang disediakan	kali		1	7.000.000		
4	01	07	01.02	47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung	jumlah pembangunan sarana dan prasarana gedung yang disediakan	unit		1	41.650.000		
4	01	07	01.03		Program peningkatan Disiplin Apatatur		persen		100	18.000.000		
4	01	07	01.03	05	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	unit		40	18.000.000		
4	01	07	01.07		Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan umum perangkat daerah	persen				95,23	1.218.780.70
4	01	07	01.07	01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi umum dan kepegawaian yang disediakan	laporan				2	233.983.59
4	01	07	01.07	02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan adminitrasi keuangan yang disediakan	laporan				2	113.846.110

4	01	07	01.07	03	Penyusunan Progran dan Laporan	jumlah laporan yang disusun	laporan				6	21.600.000
4	01	07	01.07	04	Pelayanan Umum	jumlah pelayanan umum yang disediakan	bulan				12	15.000.000
4	01	07	01.07	05	Layanan Pemerintahan	jumlah layanan pemerintahan yang disediakan	kali				23	225.600.000
4	01	07	01.07	06	Layanan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah pemberdayaan yang dilakukan	kali				23	179.080.000
4	01	07	01.07	08	Layanan Kesejahteraan Rakyat	jumlah layanan kesra yang dilakukan	kali				4	344.000.000
4	01	07	01.07	09	Layanan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	jumlah layanan yang disediakan	kali				23	85.671.000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	persen					
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen					
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dokumen					

7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	laporan					
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan					
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	orang					
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	laporan					
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	laporan					

7	01	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya yang disediakan	unit						
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	laporan						
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit						
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit						
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	eksemplar						
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang - undangan yang disediakan	buah						
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali						

7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	jenis						
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis						
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	bulan						
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kali						
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	kali						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis						

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa yang disediakan	kali										
										75	784.402.620	76,90	1.218.780.70				

Tabel Cascading Renstra PD Kecamatan Balen Tahun 2018 – 2023

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian awal Renstra (2018)	Realisasi Kinerja Program dan Pendanaan				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra		P1 / P2	Program Prioritas Bupati (1 s.d. 17)
					2019		2020		2021		2022		2023		2023			
					Realisasi	Rp	Realisasi	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab																		
Tujuan RPJMD : Mewujudkan reformasi birokrasi untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab		Indek Reformasi Birokrasi	Indek															
Sasaran RPJMD : Meningkatnya kinerja pemerintahan		Indek Sinergitas Kinerja Kecamatan	Indek	70	75	784.402.620	76,9	1.218.780.701	77	4.894.769.978	77,5	3.647.164.950	77,9	3.647.164.950	77,9	14.192.283.199		
	Tujuan PD : meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Nilai	70	75	784.402.620	76,9	1.218.780.701	77	4.894.769.978	77,5	3.647.164.950	77,9	3.647.164.950	77,9	14.192.283.199		

					Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum	nilai	4,2	4,5	47.064.157	4,614	73.126.842	4,62	293.686.199	4,65	218.829.897	4,674	218.829.897	4,674	851.536.992		
						Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu	nilai	7	7,5	78.440.262	7,69	121.878.070	7,7	489.476.998	7,75	364.716.495	7,79	364.716.495	7,79	1.419.228.320		
						Nilai kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif	nilai	7	7,5	78.440.262	7,69	121.878.070	7,7	489.476.998	7,75	364.716.495	7,79	364.716.495	7,79	1.419.228.320		
						Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya	nilai	3,5	3,75	39.220.131	3,845	60.939.035	3,85	244.738.499	3,875	182.358.248	3,895	182.358.248	3,895	709.614.160		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	persen						100	712.123.750	100	612.400.000	100	612.400.000	100	1.936.923.750	P2	
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	kali						1	5.300.000	1	3.950.000	1	3.950.000	3	13.200.000		
7	01	02	2,02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah perencanaan yang disusun	dokumen						1	5.300.000	1	3.950.000	1	3.950.000	3	13.200.000		
7	01	02	2,03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						8	31.253.750	5	1.500.000	5	1.500.000	18	34.253.750		
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						8	31.253.750	5	1.500.000	5	1.500.000	18	34.253.750		
7	01	02	2,04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	kali						2	675.570.000	2	606.950.000	2	606.950.000	6	1.889.470.000		
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah izin non usaha yang diterbitkan	unit						1	6.370.000	1	950.000	1	950.000	3	8.270.000		

7	0	0	2,0	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan	kali						20700	669.200.000	11960	606.000.000	11960	606.000.000	44620	1.881.200.000		
						Jumlah lansia yang menerima program Rantang Kasihmu																
					Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif	Nilai	25,2	27	282.384.943	27,684	438.761.052	27,72	1.762.117.192	27,9	1.312.979.382	28,044	1.312.979.382	28,044	5.109.221.952	0	0
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	perse n						100	215.767.000	100	41.239.950	100	41.239.950	100	298.246.900	P2	
7	0	0	2,0		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						3	131.670.800	3	41.239.950	3	41.239.950	9	214.150.700		
7	0	0	2,0	0	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbangdes	kelo mpok						5	31.142.000	5	25.960.000	5	25.960.000	15	83.062.000		
7	0	0	2,0	0	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						1	88.053.000	1	6.829.950	1	6.829.950	3	101.712.900		
7	0	0	2,0	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali						1	12.475.800	1	8.450.000	1	8.450.000	3	29.375.800		
7	0	0	2,0		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	kali						3	84.096.200		-		-	3	84.096.200		
7	0	0	2,0	0	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kelompok masyarakat yang ikut dalam musrenbang kelurahan	kelo mpok						3	47.926.000		-		-	3	47.926.000		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun	unit						1	25.873.200		-		-	1	25.873.200		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan	kelo mpok						1	10.297.000		-		-	1	10.297.000		

7	0	0			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	perse n					100	28.400.000	100	16.300.000	100	16.300.000	100	61.000.000	P2	
7	0	0	2,0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	10.720.000	1	3.500.000	1	3.500.000	4	17.720.000		
7	0	0	2,0	0	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	10.720.000	1	3.500.000	1	3.500.000	4	17.720.000		
7	0	0	2,0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	13.900.000	2	12.800.000	2	12.800.000	6	39.500.000		
7	0	0	2,0	0	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	13.900.000	2	12.800.000	2	12.800.000	6	39.500.000		
7	0	0	2,0		Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	3.780.000		-		-	2	3.780.000		
7	0	0	2,0	0	Sinergitas dengan kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali					2	3.780.000		-		-	2	3.780.000		
7	0	0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	perse n					100	133.320.000	100	36.635.000	100	36.635.000	100	206.590.000	P2	
7	0	0	2,0		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali					8	133.320.000	4	36.635.000	4	36.635.000	16	206.590.000		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali					1	12.360.500	1	3.115.000	1	3.115.000	3	18.590.500		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali					1	27.725.000	1	6.400.000	1	6.400.000	3	40.525.000		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali					1	18.055.600		-		-	1	18.055.600		

7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						1	21.715.900	1	7.920.000	1	7.920.000	3	37.555.900		
7	0	0	2,0	0	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						1	-		-		-	1	-		
7	0	0	2,0	1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						1	-		-		-	1	-		
7	0	0	2,0	1	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali						1	15.880.000		-		-	1	15.880.000		
7	0	0	2,0	1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali						1	37.583.000	1	19.200.000	1	19.200.000	3	75.983.000		
					Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran		5,6	6	62.752.210	6,152	97.502.456	6,16	391.581.598	6,2	291.773.196	6,2	291.773.196	6,2	1.135.382.656	0	0
						Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan		18,9	20,25	211.788.707	20,763	329.070.789	20,79	1.321.587.894	20,93	984.734.537	21,033	984.734.537	21,033	3.831.916.464	0	0
4	0	0	01.01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	perse n	100	91,21	670.128.620									91,21	670.128.620	P2	
4	0	0	01.01	0	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	jenis		12	45.600.000									12	45.600.000		
4	0	0	01.01	0	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa yang disediakan	jenis		12	5.100.000									12	5.100.000		
4	0	0	01.01	0	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	lapor an		2	59.045.000									2	59.045.000		

4	0	0	01.	0	Penyediaan peralatan / bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	jenis	2	33.616.000									2	33.616.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	jenis	6	15.826.000									6	15.826.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	ekse mplar	600	8.000.000									600	8.000.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit	2	20.000.000									2	20.000.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kali	12	45.601.620									12	45.601.620		
4	0	0	01.	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan-undangan yang disediakan	bulan	12	1.800.000									12	1.800.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum kantor yang di sediakan	bulan	12	72.100.000									12	72.100.000		
4	0	0	01.	1	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi luar daerah yang dilakukan	kali	75	15.000.000									75	15.000.000		
4	0	0	01.	1	Penyediaan jasa tenaga pendukung Administrasi/ Teknis perkantoran	jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang disediakan	kali	12	6.540.000									12	6.540.000		
4	0	0	01.	2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah yang dilakukan	kali	70	257.250.000									70	257.250.000		
4	0	0	01.	2	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum.	jumlah penunjang pelaksanaan tugas yang disediakan	kali	4	84.650.000									4	84.650.000		

4	01	07	01.02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persen	98,43	96.274.000									98	96.274.000	P2	
4	01	07	01.02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor yang disediakan	kali	1	15.000.000									1	15.000.000		
4	01	07	01.02	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional yang disediakan	unit	5	32.624.000									5	32.624.000		
4	01	07	01.02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang disediakan	kali	1	7.000.000									1	7.000.000		
4	01	07	01.02	47	Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung	jumlah pembangunan sarana dan prasarana gedung yang disediakan	unit	1	41.650.000									1	41.650.000		
4	01	07	01.03		Program peningkatan Disiplin Aparatur		persen	100	18.000.000									100		P2	
4	01	07	01.03	05	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	unit	40	18.000.000									40	18.000.000		
4	01	07	01.07		Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah	persentase pelayanan umum perangkat daerah	persen			95,23	1.218.780.701							95	1.218.780.701	P2	
4	01	07	01.07	01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi umum dan kepegawaian yang disediakan	laporan			2	233.983.591							2	233.983.591		
4	01	07	01.07	02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi keuangan yang disediakan	laporan			2	113.846.110							2	113.846.110		
4	01	07	01.07	03	Penyusunan Progran dan Laporan	jumlah laporan yang disusun	laporan			6	21.600.000							6	21.600.000		
4	01	07	01.07	04	Pelayanan Umum	jumlah pelayanan umum yang disediakan	bulan			12	15.000.000							12	15.000.000		
4	01	07	01.07	05	Layanan Pemerintahan	jumlah layanan pemerintahan yang disediakan	kali			23	225.600.000							23	225.600.000		

4	0	0	01.	0	Layanan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah pemberdayaan yang dilakukan	kali			23	179.080.000						23	179.080.000		
4	0	0	01.	0	Layanan Kesejahteraan Rakyat	jumlah layanan kesra yang dilakukan	kali			4	344.000.000						4	344.000.000		
4	0	0	01.	0	Layanan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat	jumlah layanan yang disediakan	kali			23	85.671.000						23	85.671.000		
7	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	perse n				100	3.805.159.228	100	2.940.590.000	100	2.940.590.000	100	9.326.339.228	P2	
7	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	doku men				5	21.115.600	4	8.750.650	4	8.750.650	13	38.616.900		
7	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	doku men				1	4.259.350	1	1.633.800	1	1.633.800	3	7.526.950		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali				4	4.561.900	3	854.400	3	854.400	10	6.270.700		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali				3	4.121.900	0	-	0	-	3	4.121.900		
7	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali				10	3.622.850	10	5.456.800	10	5.456.800	30	14.536.450		
7	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan yang disusun	lapor an				2	4.549.600	2	805.650	2	805.650	6	6.160.900		
7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	lapor an				2	3.227.656.877	2	2.763.488.800	2	2.763.488.800	6	8.754.634.477		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya tersedia	oran g				21	3.068.907.877	21	2.604.828.800	21	2.604.828.800	63	8.278.565.477		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan	lapor an				1	158.749.000	1	158.660.000	1	158.660.000	3	476.069.000		
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	lapor an				1	-	0	-	0	-	1	-		

7	0	0	2.0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang disediakan	unit						0	-	0	-	0	-	0	-		
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	laporan						2	51.216.701	2	30.235.350	2	30.621.750	6	112.073.801		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	unit						12	5.499.250	5	796.600	5	796.600	22	7.092.450		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	unit						4	25.825.751	4	17.987.450	4	18.373.850	12	62.187.051		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	eksemplar						630	2.279.700	300	1.851.300	300	1.851.300	1230	5.982.300		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	buah						1		0	-	0	-	1	-		
7	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	kali						69	17.612.000	60	9.600.000	60	9.600.000	189	36.812.000		
7	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	jenis						1	360.000.000	0	-	0	-	1	360.000.000		
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan	unit						1	360.000.000					1	360.000.000		
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis						3	124.619.800	2	125.486.400	2	125.100.000	7	375.206.200		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, SDA dan listrik yang disediakan	bulan						12	45.300.000	12	33.000.000	12	33.000.000	36	111.300.000		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	kali						1	5.352.400		-		-	1	5.352.400		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	kali						12	73.967.400	12	92.486.400	12	92.100.000	36	258.553.800		

7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis						3	20.550.250	4	12.628.800	4	12.628.800	11	45.807.850		
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa yang disediakan	kali						10	20.550.250	10	12.628.800	10	12.628.800	30	45.807.850		
									75	784.402.620	76,90	1.218.780.701	77,00	4.894.769.978	77,50	3.647.164.950	77,90	3.647.164.950	77,90	14.192.283.199		

2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Balen bahwa ditentukan isu - isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bojonegoro kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar - benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, tepat dan bermanfaat bagi rakyat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b) Program prioritas pembangunan daerah dan;
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PP.

Rencana Kerja Kecamatan Balen berdasarkan RKPD Kabupaten Bojonegoro sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Bojonegoro yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Balen.

Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rancangan RKPD P-APBD Tahun 2024
Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator disesuaikan Kepmen 900.1.16.6-1317 Tahun 2023)	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
			Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif		
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UNSUR KEWILAYAHAN								
KECAMATAN BALEN						3.630.352.376	3.887.395.340	3.811.648.878
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	persen	100 %	100 %	100%	2.925.001.976	3.180.123.940	3.047.360.078
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dok	4 dokumen	4 dokumen	12 dok	8.706.900	8.706.900	9.639.400
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2 dok	2 dok	3 dok	2.714.500	2.714.500	2.714.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	dok	2 dok	2 dok	3 dok	1.362.800	1.362.800	2.295.300

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10 laporan	10 laporan	20 kali	1.939.300	1.939.300	1.939.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 dok	2.690.300	2.690.300	2.690.300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2.678.646.326	2.874.890.790	2.651.544.328
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20 Orang	20 Orang	20 orang	2.575.516.226	2.771.760.690	2.546.014.228
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	12 dokumen	12 dokumen	2 laporan	103.130.100	103.130.100	105.530.100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	51.270.000	63.039.800	168.395.700

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5 paket	5 paket	5 unit	795.600	795.600	795.600
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	3 unit	3 unit	5 unit	23.592.100	31.769.100	118.347.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	15.231.300	15.354.100	18.253.100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	2 paket	300 exemplar	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60 laporan	60 laporan	70 kali	10.051.000	13.521.000	29.400.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	148.023.950	185.381.650	175.855.850
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 kali	37.213.950	37.213.950	37.913.650

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 kali	110.810.000	148.167.700	137.942.200
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis	30 jenis	30 jenis	3 jenis	38.354.800	48.104.800	41.924.800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10 unit	10 unit	10 kali	16.604.800	26.354.800	16.604.800
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6 unit	6 unit	10 kali	4.750.000	4.750.000	8.320.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1 unit	1 unit	1 unit	17.000.000	17.000.000	17.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	persen	100 %	100 %	100%	613.364.500	613.364.500	643.993.800

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1.594.900	1.594.900	51.594.900
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	1 laporan	1 laporan	2 dok	1.594.900	1.594.900	51.594.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	kali	2 kali	2 kali	2 kali	611.769.600	611.769.600	592.398.900
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 unit	2.370.600	2.370.600	2.370.600
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	609.399.000	609.399.000	590.028.300
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	persen	100 %	100 %	100%	38.099.900	43.820.900	70.209.000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	13 kali	13 kali	6 kali	38.099.900	43.820.900	70.209.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 kelompok	23.960.000	23.960.000	20.574.500
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 kali	6.829.900	6.829.900	6.829.900
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1 laporan	1 laporan	5 kali	7.310.000	13.031.000	42.804.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	persen	100 %	100 %	100%	13.751.000	13.751.000	8.801.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	10 kali	10 kali	10 kali	4.616.000	4.616.000	4.616.000
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	40 laporan	40 laporan	10 kali	4.616.000	4.616.000	4.616.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	20 kali	20 kali	20 kali	9.135.000	9.135.000	4.185.000

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	60 laporan	60 laporan	50 laporan	9.135.000	9.135.000	4.185.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	persen	100 %	100 %	100%	40.135.000	36.335.000	41.285.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali	7 kali	7 kali	4 kali	40.135.000	36.335.000	41.285.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	2 kali	2 kali	2 kali	4.315.000	4.315.000	4.315.000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 kali	18.420.000	14.620.000	14.620.000
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	17.400.000	17.400.000	22.350.000
TOTAL						3.630.352.376	3.887.395.340	3.811.648.878

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Balen pada perubahan anggaran tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan umum dan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang - undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas - tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Balen maka keempat hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

Tabel T-C 32

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024 Kabupaten Bojonegoro

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, isu - isu strategis pembangunan Kabupaten Bojonegoro dirumuskan berdasarkan permasalahan - permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek fisik - lingkungan, social -budaya, ekonomi - keuangan dan legal - kelembagaan.

A. Prioritas Nasional.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2020- 2024 memiliki visi dan misi selama menjabat. Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden adalah **Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong**. Untuk mewujudkan visi tersebut, disusunlah 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mengkonkritkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024 dengan sasaran mewujudkan masyarakat

Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020- 2024 diantaranya :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
3. Struktur ekonomi yang maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Keempat Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas yaitu

- PN 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
- PN 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN 5. Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 disusun dengan tema **"Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2024 meliputi:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;

- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Dalam RKP Tahun 2024 disebutkan bahwa, Sasaran Pembangunan Nasional 2024 meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 hingga 5,7 persen,
2. Tingkat kemiskinan dapat ditekan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen,
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 5 hingga 5,7 persen,
4. Rasio gini 0,374 hingga 0,377
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 73-74,
6. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 27,27,
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105 hingga 108,
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) hingga 110

Memperhatikan arah kebijakan Nasional Tahun 2024, Rencana Kerja Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 tidak mendukung secara langsung prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, namun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, maka dukungan Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2024 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh Kecamatan Balen maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah Kecamatan Balen dapat diarahkan untuk mendukung sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.

Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Balen terkait erat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
- b. Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Meningkatnya disiplin aparatur

3.3. Program Dan Kegiatan.

3.3.1 Program.

Sesuai dengan Rankir Renja Kantor Kecamatan Balen maka program - program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

3.3.2 Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD yang ada di Kecamatan
7. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
11. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
12. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Bab ini menyajikan rumusan rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif yang disajikan dalam tabel T-C.33. yaitu sebagai berikut :

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Tabel TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan P-APBD Tahun 2024 Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro

Nama PD : Kecamatan Balen

Lembar dari

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Indikator disesuaikan Kepmen900.1.16.6- 1317 Tahun 2024)	Satuan Indi kator	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Selisih Lebih / (Kurang)		Catatan Penting
			Target Kinerja 2024			Pagu Indikatif					Pagu RKPD Perubahan dikurangi RKPD Induk	Pagu Perubahan RKPD dikurangi APBD Induk	
			RKPD 2024	APBD 2024	P-RKPD 2024	RKPD 2024	APBD 2024	Perubahan RKPD 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 =(9-7)	13 =(9-8)	14
UNSUR KEWILAYAHAN													
KECAMATAN BALEN						3.630.352.376	3.887.395.340	3.811.648.878			181.296.502	-75.746.462	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan kegiatan urusan penunjang pemerintahan daerah	persen	100 %	100 %	100%	2.925.001.976	3.180.123.940	3.047.360.078			122.358.102	(132.763.862)	
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	dok	4 dokumen	4 dokumen	12 dok	8.706.900	8.706.900	9.639.400			932.500	932.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dok	2 dok	2 dok	3 dok	2.714.500	2.714.500	2.714.500	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dok	2 dok	2 dok	3 dok	1.362.800	1.362.800	2.295.300	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	932.500	932.500	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	10 laporan	10 laporan	20 kali	1.939.300	1.939.300	1.939.300	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 dok	2.690.300	2.690.300	2.690.300	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	2.678.646.326	2.874.890.790	2.651.544.328			(27.101.998)	(223.346.462)	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	20 Orang	20 Orang	20 orang	2.575.516.226	2.771.760.690	2.546.014.228	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum & Dana Bagi Hasil	(29.501.998)	(225.746.462)	Pengurangan gaji
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dok	12 dokumen	12 dokumen	2 laporan	103.130.100	103.130.100	105.530.100	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	2.400.000	2.400.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	laporan	2 laporan	2 laporan	2 laporan	51.270.000	63.039.800	168.395.700			117.125.700	105.355.900	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	5 paket	5 paket	5 unit	795.600	795.600	795.600	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	3 unit	3 unit	5 unit	23.592.100	31.769.100	118.347.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	94.754.900	86.577.900	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4 paket	4 paket	4 paket	15.231.300	15.354.100	18.253.100	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3.021.800	2.899.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2 paket	2 paket	300 exemplar	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	60 laporan	60 laporan	70 kali	10.051.000	13.521.000	29.400.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	19.349.000	15.879.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	148.023.950	185.381.650	175.855.850			27.831.900	(9.525.800)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 kali	37.213.950	37.213.950	37.913.650	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	699.700	699.700	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 kali	110.810.000	148.167.700	137.942.200	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	27.132.200	(10.225.500)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	jenis	30 jenis	30 jenis	3 jenis	38.354.800	48.104.800	41.924.800			3.570.000	(6.180.000)	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10 unit	10 unit	10 kali	16.604.800	26.354.800	16.604.800	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	(9.750.000)	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	6 unit	6 unit	10 kali	4.750.000	4.750.000	8.320.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	3.570.000	3.570.000	
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	unit	1 unit	1 unit	1 unit	17.000.000	17.000.000	17.000.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	persen	100 %	100 %	100%	613.364.500	613.364.500	643.993.800			30.629.300	30.629.300	

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan	kali	1 kali	1 kali	1 kali	1.594.900	1.594.900	51.594.900			50.000.000	50.000.000	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	1 laporan	1 laporan	2 dok	1.594.900	1.594.900	51.594.900	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	50.000.000	50.000.000	SKM
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	kali	2 kali	2 kali	2 kali	611.769.600	611.769.600	592.398.900			(19.370.700)	(19.370.700)	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 unit	2.370.600	2.370.600	2.370.600	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	609.399.000	609.399.000	590.028.300	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil & Silpa	(19.370.700)	(19.370.700)	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	persen	100 %	100 %	100%	38.099.900	43.820.900	70.209.000			32.109.100	26.388.100	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	kali	13 kali	13 kali	6 kali	38.099.900	43.820.900	70.209.000			32.109.100	26.388.100	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga	5 lembaga kemasyarakatan	5 lembaga kemasyarakatan	5 kelompok	23.960.000	23.960.000	20.574.500	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	(3.385.500)	(3.385.500)	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 kali	6.829.900	6.829.900	6.829.900	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	1 laporan	1 laporan	5 kali	7.310.000	13.031.000	42.804.600	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	35.494.600	29.773.600	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	persen	100 %	100 %	100%	13.751.000	13.751.000	8.801.000			(4.950.000)	(4.950.000)	

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	10 kali	10 kali	10 kali	4.616.000	4.616.000	4.616.000			-	-	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	40 laporan	40 laporan	10 kali	4.616.000	4.616.000	4.616.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah koordinasi yang dilakukan	kali	20 kali	20 kali	20 kali	9.135.000	9.135.000	4.185.000			(4.950.000)	(4.950.000)	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	laporan	60 laporan	60 laporan	50 laporan	9.135.000	9.135.000	4.185.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	(4.950.000)	(4.950.000)	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	persen	100 %	100 %	100%	40.135.000	36.335.000	41.285.000			1.150.000	4.950.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	kali	7 kali	7 kali	4 kali	40.135.000	36.335.000	41.285.000			1.150.000	4.950.000	

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	2 kali	2 kali	2 kali	4.315.000	4.315.000	4.315.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	-	-	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 kali	18.420.000	14.620.000	14.620.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	(3.800.000)	-	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan	20 laporan	20 laporan	20 laporan	17.400.000	17.400.000	22.350.000	Kab. Bojonegoro, balen	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4.950.000	4.950.000	
TOTAL						3.630.352.376	3.887.395.340	3.811.648.878	75.746.462		181.296.502	-75.746.462	

BAB V

PENUTUP

Demikian serangkaian uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) P-APBD Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, sebagai bahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Selain merupakan Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencana Pembangunan Nominal (SPPN) dan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) Kecamatan Balen ini sebagai Evaluasi pelaksanaan RENJA-PD tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra PD Kecamatan Balen.

Berdasarkan berbagai Peraturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Rancangan Renja – PD) P-APBD Kecamatan Balen Tahun 2024 ini, diharapkan bisa menjadi bahan menuju pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada prinsip prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Balen , 31 Juli 2024


CAMAT BALEN
AGUS RAHARDJO, SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690813 200112 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN BALEN

Jl. Raya Balen No. 56 Balen

[E-mail:kecamatan_balen.balendamai403@gmail.com](mailto:kecamatan_balen.balendamai403@gmail.com)

BOJONEGORO

KEPUTUSAN

CAMAT BALEN KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 16 /KEP/412.302/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN BALEN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

KECAMATAN BALEN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Camat Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Balen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024;
 - b. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024 berdasarkan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - d. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
 - e. Menyusun Rancangan Akhir Renja & Penetapan Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
 - f. Menyusun Rancangan Renja Perubahan dan Rancangan Akhir Renja Perubahan Tahun 2024;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balen
Pada tanggal : 5 April 2023



CAMAT BALEN

AGUS RAHARDJO, SE, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19690813 200112 1 007

Lampiran Keputusan Camat Balen
Kabupaten Boonegoro
Nomor : 188/16/KEP/412.403/2023
Tanggal : 5 April 2023

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2023**

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pengarah	Camat Balen
2.	Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kasubag Program dan Laporan Kecamatan Balen
4.	Anggota	a. Kasi Pemerintahan; b. Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; c. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa; d. Kasi Kesejahteraan Rakyat; e. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan.

**CAMAT BALEN**
AGUS RAHARDJO, SE, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19690813 200112 1 007